

KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN: TINJAUAN LITERATUR TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DENGAN ADANYA EFISIENSI ANGGARAN DARI PUSAT

Lukman Rais^{1*}, Wahyudin Halik², Agnes Taopan³, Mirda Rumodar⁴, Rofina R. Yanyaan⁵, Rita L. Saiba⁶

^{1,3,4,5,6}Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

²Program Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

*Korespondensi: lukmanrais28@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.33506/pjs.v1i1.Maret.4736>

Abstract

In the development of a country, social justice is one of the important aspects that must be maintained so that development can be evenly distributed and felt by all levels of society. However, with the central government's implementation of budget efficiency, issues often arise regarding the uneven distribution of budgets among regions, which has the potential to cause social injustice. Therefore, the purpose of this study is to review the literature discussing the relationship between efficient development policies and social justice. This study employs a literature review method, analyzing various sources that discuss development policies and their impact on social justice in different regions. The results show that while budget efficiency can improve public sector performance and minimise waste, imbalances in budget distribution can exacerbate social disparities. Furthermore, development policies that focus on efficiency without considering aspects of social justice can exacerbate the gap between developed and underdeveloped regions. Development policies that prioritise budget efficiency need to be balanced with attention to the equitable distribution of budgets, so that development is fair and can be enjoyed by the entire community.

Keywords: Social Justice; Budget Efficiency; Development Policy

Abstrak

Dalam pembangunan suatu negara, keadilan sosial merupakan salah satu aspek penting yang harus dijaga, agar pembangunan dapat merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, dengan adanya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat, seringkali muncul masalah terkait distribusi anggaran yang tidak seimbang antar daerah, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji literatur yang membahas hubungan antara kebijakan pembangunan yang efisien dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan menganalisis berbagai sumber yang membahas kebijakan pembangunan serta dampaknya terhadap keadilan sosial di berbagai daerah. Hasil menunjukkan bahwa meskipun efisiensi anggaran dapat meningkatkan kinerja sektor publik dan meminimalkan pemborosan, ketidakseimbangan dalam distribusi anggaran dapat memperburuk kesenjangan sosial. Selain itu, kebijakan pembangunan yang berfokus pada efisiensi tanpa memperhatikan aspek keadilan sosial dapat memperburuk ketimpangan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Kebijakan pembangunan yang mengutamakan efisiensi anggaran perlu diimbangi dengan perhatian terhadap pemerataan distribusi anggaran, agar tercipta pembangunan yang berkeadilan dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Kata Kunci: Keadilan Sosial; Efisiensi Anggaran; Kebijakan Pembangunan

PENDAHULUAN

Keadilan sosial merupakan konsep penting dalam pembangunan suatu negara. Keadilan sosial dalam konteks pembangunan mengacu pada upaya pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi

seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini mengedepankan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang beruntung. Di sisi lain, efisiensi anggaran dari pemerintah pusat sering kali menjadi

tema yang diperbincangkan dalam kebijakan pembangunan, karena efisiensi dalam pengelolaan anggaran dinilai sebagai faktor yang penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang adil dan merata Salman, S., & Ikbal, M. (2025).

Tinjauan literatur mengenai kebijakan pembangunan dalam konteks keadilan sosial sering kali menyoroti bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi distribusi sumber daya dan manfaat dari pembangunan itu sendiri Yetmi, U. S. (2021). Salah satu isu yang sering dihadapi adalah bagaimana kebijakan yang disusun di tingkat pusat dapat menyeimbangkan antara kebutuhan untuk efisiensi anggaran dan upaya untuk memperjuangkan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika mempertimbangkan disparitas antara wilayah yang lebih maju dengan yang tertinggal, serta ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat.

Dalam penelitian ini, tujuan utama adalah untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana kebijakan pembangunan yang ditentukan oleh pemerintah pusat, yang didasarkan pada prinsip efisiensi anggaran, dapat mempengaruhi keadilan sosial dalam pembangunan di berbagai wilayah. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat dapat menanggulangi ketimpangan sosial dan memberikan manfaat yang lebih merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk

menilai dampak dari kebijakan tersebut terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti masyarakat miskin dan daerah yang tertinggal Tirtosuharto, D. (2022).

Masalah utama yang muncul dalam kajian ini adalah ketegangan antara prinsip efisiensi anggaran dan prinsip keadilan sosial dalam pembangunan. Di satu sisi, efisiensi anggaran sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efektivitas program pembangunan Hadiansyah, Y. (2025). Namun, dalam praktiknya, efisiensi anggaran sering kali berdampak negatif pada kelompok-kelompok yang paling membutuhkan bantuan, karena alokasi anggaran yang terbatas cenderung diarahkan pada proyek-proyek yang dianggap lebih efisien secara ekonomi, namun kurang memperhatikan aspek keadilan sosial.

Ketimpangan ini dapat dilihat dalam perbedaan kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat di daerah perkotaan dan daerah terpencil. Daerah-daerah yang lebih maju dan lebih dekat dengan pusat pemerintahan sering kali mendapatkan lebih banyak sumber daya dan perhatian, sementara daerah-daerah tertinggal seringkali kesulitan dalam mengakses layanan publik yang berkualitas Mursalin, D., & Irawan, T. (2025). Sebagai contoh, sektor pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal sering kali

kekurangan fasilitas dan tenaga kerja yang memadai, padahal sektor-sektor ini merupakan elemen penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, salah satu celah atau masalah yang teridentifikasi dalam judul ini adalah bagaimana efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat dapat berdampak pada ketimpangan sosial yang semakin melebar. Efisiensi anggaran, yang sering kali berfokus pada pengurangan biaya, dapat mengabaikan kebutuhan mendasar daerah-daerah yang membutuhkan lebih banyak investasi dalam pembangunan infrastruktur dasar Supriyantony, E. (2024).

Hal ini bisa menyebabkan daerah-daerah yang kurang berkembang semakin tertinggal, sehingga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, gap yang terjadi bukan hanya dalam hal distribusi anggaran, tetapi juga dalam pemahaman tentang kebutuhan yang lebih mendalam terhadap setiap wilayah.

Dalam penelitian ini, analisis terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi anggaran pembangunan Nurhayana, E., & Soebagiyo, D. (2023). Salah satu hal yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya perencanaan yang berbasis pada data yang akurat mengenai kondisi sosial-ekonomi di berbagai wilayah. Tanpa data yang representatif, kebijakan yang dibuat bisa saja tidak mencerminkan kebutuhan

riil masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi kurang efektif dalam mencapai tujuan keadilan sosial. Kebijakan yang hanya berfokus pada efisiensi anggaran tanpa memperhitungkan ketimpangan yang ada, berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam distribusi manfaat pembangunan.

Rekomendasi yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah pentingnya mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, meskipun efisiensi anggaran tetap menjadi perhatian utama. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah mengalokasikan anggaran yang lebih besar bagi daerah-daerah yang tertinggal atau memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, dengan tujuan untuk menciptakan pemerataan dalam pembangunan Mualifu, M., Guspul, A., & Hermawan, H. (2019). Pendekatan yang lebih berbasis pada kebutuhan riil di masing-masing wilayah juga harus diterapkan, di mana kebijakan pembangunan tidak hanya mengandalkan indikator makro, tetapi juga memperhatikan kondisi mikro di tingkat daerah.

Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan agar kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka. Dengan demikian, efisiensi anggaran yang diterapkan dapat berkontribusi pada pencapaian keadilan sosial, bukan justru mengabaikan kelompok-

kelompok yang membutuhkan bantuan lebih banyak Bird, RM, & Zolt, EM (2005). Pemerintah pusat perlu lebih fleksibel dalam merancang kebijakan agar dapat menyeimbangkan antara kebutuhan efisiensi anggaran dan pencapaian tujuan keadilan sosial.

Secara keseluruhan, penelitian ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada efisiensi anggaran dapat tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial, dengan memperhitungkan ketimpangan yang ada dan berusaha untuk menciptakan pemerataan dalam pembangunan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif literatur yang bertujuan untuk mengkaji keadilan sosial dalam pembangunan, khususnya terkait dengan kebijakan pembangunan dan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Metode deskriptif literatur memungkinkan peneliti untuk menggali konsep, teori, dan kajian-kajian terdahulu terkait isu yang sedang diteliti tanpa memerlukan pengumpulan data primer seperti wawancara atau observasi. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dapat mendorong terciptanya keadilan sosial, dengan menekankan efisiensi anggaran sebagai salah satu aspek penting dalam mewujudkan kebijakan yang berkeadilan.

Pendekatan literatur ini dilakukan dengan menelaah berbagai referensi dari buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta kebijakan-kebijakan yang relevan. Beberapa kajian pustaka yang dapat menjadi landasan untuk penelitian ini mencakup teori-teori tentang keadilan sosial dalam pembangunan (Sen, 2009), teori efisiensi anggaran Stiglitz, (2002), serta dampak kebijakan pembangunan terhadap distribusi kesejahteraan sosial. Dalam menganalisis berbagai referensi, peneliti akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan pembangunan yang didorong oleh efisiensi anggaran dapat memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, serta sejauh mana kebijakan tersebut dapat meminimalisir ketimpangan sosial-ekonomi di berbagai wilayah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara kebijakan pembangunan dan keadilan sosial dengan perspektif efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Referensi yang relevan akan disertakan dalam kajian pustaka untuk memberikan dasar teori yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Keadilan Sosial dalam Konteks Pembangunan

Keadilan sosial dalam konteks pembangunan merujuk pada prinsip bahwa hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa

terkecuali. Hal ini melibatkan pemerataan dalam distribusi kekayaan, kesempatan, dan sumber daya yang ada. Keadilan sosial tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan bahkan kebebasan politik. Konsep ini mengarah pada upaya untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, serta antara wilayah yang lebih maju dengan daerah yang tertinggal. Dalam kebijakan pembangunan, keadilan sosial menuntut agar setiap individu, tanpa memandang status sosial, gender, atau etnis, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya yang disediakan oleh negara Nussbaum, M. C. (2011).

Di Indonesia, masalah keadilan sosial dalam pembangunan menjadi isu yang semakin krusial, terutama setelah mengalami reformasi dan dekade-dekade pertumbuhan ekonomi yang pesat. Meskipun Indonesia telah mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan, ketimpangan sosial masih menjadi masalah yang mendalam Tadjoeeddin, M. Z. (2016). Sebagai contoh, ada wilayah-wilayah yang sangat terpinggirkan dan tertinggal, terutama di Indonesia bagian timur, yang akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial yang jelas antara daerah yang lebih berkembang dan yang tertinggal. Di sisi lain, beberapa kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, meskipun menjadi pusat perekonomian, mengalami kemacetan, polusi, serta semakin tingginya harga tanah dan

properti, yang berkontribusi pada makin terjauhnya akses terhadap rumah yang terjangkau bagi sebagian besar masyarakat Arifin et al., (2024).

Bukti konkret dapat dilihat dari penerapan berbagai kebijakan pembangunan di Indonesia yang seharusnya dapat mengatasi ketimpangan ini. Program-program seperti Dana Desa yang dicanangkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah, memberikan kesempatan lebih banyak bagi daerah-daerah yang selama ini tidak terjangkau oleh pembangunan. Namun, kendati ada upaya untuk meningkatkan alokasi dana bagi daerah tertinggal, tantangan dalam distribusi dan pengelolaan dana tersebut masih menyisakan masalah. Korupsi dan ketidakmampuan pemerintahan daerah dalam mengelola dana yang ada sering kali menjadi penghalang utama tercapainya pemerataan yang diharapkan Waheduzzaman, W. (2019).

Sementara itu, di luar negeri, negara-negara dengan model pembangunan yang lebih maju telah berhasil menunjukkan bagaimana penerapan keadilan sosial dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Di Skandinavia, misalnya, negara seperti Swedia dan Norwegia telah mengimplementasikan sistem sosial yang memperhatikan kesejahteraan warganya secara keseluruhan, termasuk melalui pemerataan akses terhadap layanan

kesehatan, pendidikan, dan peluang kerja
Lundberg, O. (2007).

Skema pajak progresif yang diterapkan di negara-negara ini juga berperan penting dalam menciptakan redistribusi kekayaan yang lebih adil, sehingga mengurangi jurang ketimpangan antara warga kaya dan miskin Da Silva, M. (2012).

Di Amerika Serikat, meskipun dikenal sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia, ketimpangan sosial masih menjadi masalah besar. Masyarakat di negara ini terbelah antara kelompok kaya dan miskin, dengan sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada kelompok elit. Fenomena ini diperburuk dengan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja. Krisis perumahan di beberapa kota besar Amerika, seperti San Francisco dan New York, menunjukkan betapa sulitnya bagi sebagian masyarakat untuk mengakses rumah yang layak, meskipun negara ini memiliki tingkat kekayaan yang sangat tinggi. Dalam hal ini, keadilan sosial sangat berkaitan dengan upaya untuk memastikan bahwa keuntungan dari pembangunan ekonomi dapat dibagi lebih merata di seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang Nussbaum, M. C. (2011).

Di negara-negara berkembang lainnya, seperti Brasil dan India, masalah keadilan sosial sering kali menjadi isu sentral dalam pembangunan. Brasil, misalnya, meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat

dalam beberapa dekade terakhir, tetap menghadapi tantangan besar terkait ketimpangan sosial. Program-program seperti Bolsa Família di Brasil yang memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin, menunjukkan upaya untuk menciptakan pemerataan dalam distribusi kesejahteraan Glewwe, P., & Kassouf, A. L. (2008). Namun, tantangan untuk mengurangi ketimpangan ini masih besar, karena banyaknya ketergantungan pada kebijakan sementara yang tidak berkelanjutan.

Secara keseluruhan, keadilan sosial dalam pembangunan berhubungan erat dengan kemampuan suatu negara untuk menciptakan sistem yang inklusif, memberikan akses setara bagi seluruh masyarakat terhadap peluang yang ada, serta memastikan bahwa manfaat dari pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat Gupta, J., & Vegelin, C. (2023). Tantangan terbesar adalah bagaimana negara dapat mengatasi ketimpangan yang ada, baik yang bersifat geografis, ekonomi, sosial, maupun politik, dengan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan Anwar, M. S. (2022). Di Indonesia, upaya ini harus diperjuangkan dengan perhatian khusus terhadap daerah-daerah yang terpinggirkan, sementara di negara-negara maju, meskipun telah berhasil mengurangi ketimpangan, tantangan baru dalam mempertahankan keadilan sosial terus muncul, seiring dengan perubahan struktur ekonomi global dan dinamika sosial yang

terus berkembang Suryanto, T., Utami, P., & Ahmad, R. (2024).

Hubungan Antara Keadilan Sosial dan Kebijakan Pembangunan

Keadilan sosial dalam kebijakan pembangunan Indonesia adalah suatu konsep yang mengarah pada pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi sosial-ekonomi yang kurang beruntung Aqilah, I. N., & Najicha, F. U. (2023). Pencapaian keadilan sosial ini menjadi salah satu tujuan utama dalam setiap kebijakan pembangunan yang dirancang oleh pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan fasilitas lainnya yang mendukung kualitas hidup Baihaqi, I. (2024).

Sebagai contoh, salah satu kebijakan pembangunan yang berfokus pada keadilan sosial adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin. PKH bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dengan memberikan bantuan finansial secara langsung kepada keluarga yang terdaftar dalam program ini, sambil mendorong mereka untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan Anindita, G. N. K. (2024). Melalui kebijakan seperti ini, pemerintah berusaha memperbaiki kualitas

hidup keluarga miskin dan memastikan mereka dapat mengakses layanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara, tanpa terkecuali.

Namun, keadilan sosial dalam pembangunan tidak hanya terbatas pada pembagian bantuan finansial, tetapi juga berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah-daerah tertinggal. Salah satu kebijakan yang mencerminkan hal ini adalah pembangunan infrastruktur di kawasan luar Jawa. Pemerintah Indonesia, melalui program-program seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), berfokus pada pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian, seperti di Papua, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan publik, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di daerah-daerah tersebut Listyono, Oinike, & Hambali, (2025). Selain itu, dalam konteks pendidikan, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Beberapa kebijakan yang signifikan adalah pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, serta program wajib belajar sembilan tahun yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar di seluruh daerah. Meskipun tantangan

tetap ada, terutama di daerah-daerah yang terisolasi, kebijakan ini menunjukkan upaya serius pemerintah untuk memberikan keadilan sosial melalui pendidikan.

Namun, penerapan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berfokus pada keadilan sosial tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah ketimpangan antarwilayah yang masih sangat mencolok, terutama antara Jawa dan luar Jawa. Wilayah-wilayah di luar Jawa seringkali mengalami kesulitan dalam hal akses terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai. Bahkan, meskipun ada kebijakan pembangunan yang mengarah pada pemerataan, proses distribusi anggaran yang tidak merata masih menjadi masalah besar.

Di sisi lain, faktor lain yang juga mempengaruhi keadilan sosial dalam pembangunan adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan di daerah mereka Silver, C. (2024). Sering kali, kebijakan pembangunan ditentukan oleh pihak yang jauh dari realitas lokal, yang mengarah pada kebijakan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan agar kebijakan tersebut benar-benar dapat mencapai tujuan keadilan sosial.

Secara keseluruhan, kebijakan pembangunan yang berbasis pada keadilan

sosial di Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan bahwa hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun tantangan besar masih ada, upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar terus dilakukan. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan sistem pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan Rasdi, D., & Kurniawan, T. (2019).

Efisiensi Anggaran dalam Kebijakan Pembangunan

Efisiensi anggaran dalam kebijakan pembangunan adalah konsep yang sangat penting karena mencerminkan sejauh mana alokasi dana publik dapat digunakan secara optimal tanpa pemborosan. Dalam konteks Indonesia, efisiensi anggaran berkaitan dengan bagaimana pemerintah pusat mengelola sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan Handayani, Suharno, & Badriah, 2022). Efisiensi anggaran dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pengalokasian, pengeluaran, hingga pengawasan anggaran. Namun, penghematan anggaran yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek keadilan sosial dapat memunculkan ketimpangan dalam distribusi hasil pembangunan.

Di Indonesia, salah satu contoh penerapan efisiensi anggaran yang kontroversial adalah saat pemerintah berupaya memangkas anggaran untuk subsidi energi, khususnya subsidi BBM dan listrik, dalam beberapa tahun terakhir (Sovacool, BK (2017)). Tujuan dari pemangkasan ini adalah untuk mengurangi defisit anggaran dan alokasi anggaran yang lebih fokus pada sektor-sektor prioritas lainnya, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun kebijakan ini berhasil mengurangi beban fiskal negara, dampaknya terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah cukup signifikan. Mereka yang selama ini bergantung pada subsidi energi merasa terbebani oleh kenaikan harga barang dan layanan yang dihasilkan dari pemangkasan subsidi tersebut. Di sisi lain, efisiensi anggaran di sektor ini belum sepenuhnya dapat mengalirkan keuntungan kepada kelompok masyarakat tersebut melalui program sosial yang lebih terarah.

Sementara itu, di luar negeri, banyak negara yang juga mengalami tantangan serupa dalam menciptakan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keadilan sosial. Di Eropa, misalnya, negara-negara seperti Inggris dan Spanyol telah berusaha mengurangi defisit anggaran mereka dengan memangkas pengeluaran pemerintah, terutama dalam sektor sosial dan kesejahteraan. Namun, pemotongan ini sering kali mengarah pada ketidakpuasan masyarakat, terutama dari kalangan kelas pekerja dan penerima bantuan sosial. Di Inggris, kebijakan penghematan anggaran pada masa

pemerintahan David Cameron, yang dikenal dengan kebijakan “austerity,” memotong anggaran untuk layanan kesehatan dan bantuan sosial. Meskipun ini membantu mengurangi utang negara, dampaknya terasa sangat dalam pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan, yang harus menghadapi peningkatan kesulitan ekonomi dan berkurangnya akses terhadap layanan publik (Škuflić, Vučković, & Walter, 2024). Namun, ada juga contoh negara yang berhasil mencapai efisiensi anggaran tanpa mengorbankan keadilan sosial. Di negara-negara Skandinavia, seperti Swedia dan Norwegia, pemerintah berhasil menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dengan tetap menjaga kualitas layanan sosial dan pemerataan pembangunan (Christensen et al., 2024). Salah satu cara mereka mencapainya adalah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi sektor publik. Di Norwegia, misalnya, kebijakan anggaran diarahkan untuk memperbaiki transparansi penggunaan dana publik melalui sistem pengawasan yang ketat dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah juga memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk sektor sosial dan pendidikan tidak dipotong, meskipun ada upaya untuk mengurangi pengeluaran di sektor lain.

Dengan demikian, efisiensi anggaran dalam kebijakan pembangunan tidak hanya

soal mengurangi pemborosan atau defisit, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang lebih rentan. Efisiensi yang berlebihan dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial, terutama jika anggaran yang dipangkas berasal dari sektor-sektor yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merencanakan kebijakan anggaran secara cermat, menjaga keseimbangan antara penghematan dan distribusi manfaat yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Kesejahteraan sosial harus tetap menjadi prioritas meskipun efisiensi anggaran menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan Steinbacher, C. (2024).

Peran Pemerintah Pusat dalam Mengelola Anggaran Pembangunan

Pemerintah pusat memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola anggaran pembangunan, terutama dalam memastikan bahwa alokasi anggaran yang ada dapat mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Kebijakan anggaran dari pusat tidak hanya mencakup pendanaan yang besar, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut didistribusikan ke daerah-daerah, dengan mempertimbangkan prioritas yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan anggaran dari pusat harus mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi dalam penggunaan dana dan keadilan dalam distribusinya Mursalin, D., & Irawan, T. (2025).

Di Indonesia, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk menyediakan anggaran untuk berbagai sektor, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program kesejahteraan sosial. Namun, distribusi anggaran ini seringkali menghadapi tantangan besar, mengingat disparitas antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Beberapa daerah yang lebih maju, terutama di Pulau Jawa, sering mendapatkan anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah di luar Jawa. Hal ini bisa terjadi karena daerah yang lebih berkembang memiliki lebih banyak sumber daya dan kebutuhan yang lebih kompleks, sedangkan daerah yang lebih terpencil atau kurang berkembang seringkali terpinggirkan dalam perencanaan anggaran Sari, R. (2014).

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat berupaya untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Misalnya, dengan adanya kebijakan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang bertujuan untuk membantu daerah-daerah yang membutuhkan anggaran lebih untuk pembangunan, terutama daerah yang memiliki keterbatasan dalam sumber daya Hatim, F., & Hijrasil, H. (2024). Dana ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam pembangunan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan memastikan bahwa daerah-daerah yang lebih membutuhkan dapat mendapatkan perhatian lebih.

Namun, kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi di tingkat daerah Riambo, R. M., Suryawati, C., & Arso, S. P. (2020). Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam mengelola anggaran secara efisien, yang terkadang mengakibatkan pemborosan atau ketidaktepatan alokasi dana. Selain itu, ada juga masalah dalam pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang dapat mempengaruhi efektivitas dan pencapaian tujuan pembangunan yang diinginkan.

Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Salah satunya adalah melalui penerapan sistem informasi manajemen anggaran yang memungkinkan pengawasan lebih baik terhadap penggunaan dana. Selain itu, program-program pembangunan yang berbasis pada hasil dan pengawasan yang ketat juga mulai diterapkan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.

Secara keseluruhan, meskipun pemerintah pusat memiliki peran krusial dalam pengelolaan anggaran pembangunan, masih ada tantangan dalam menciptakan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keadilan social Untuk mencapai tujuan pembangunan yang adil dan merata, penting bagi kebijakan anggaran pusat untuk terus berkembang dan disesuaikan dengan

dinamika kebutuhan sosial dan ekonomi di berbagai daerah.

Model Kebijakan yang Mencapai Keadilan Sosial melalui Efisiensi Anggaran

Dalam konteks kebijakan pembangunan di Indonesia, model kebijakan yang berhasil mengintegrasikan efisiensi anggaran dengan tujuan pencapaian keadilan sosial adalah sebuah tantangan besar Irawan, R., & Pasaribu, E. (2024). Beberapa program yang dirancang untuk mencapai tujuan ini sering kali menjadi sorotan dalam diskusi mengenai distribusi anggaran yang adil dan transparan. Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Dana Desa menunjukkan bagaimana efisiensi anggaran dapat mendukung pencapaian keadilan sosial, meskipun tantangan terus muncul Rajagukguk et al., 2025. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial yang paling sukses di Indonesia. PKH dirancang untuk memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan cara ini, program ini tidak hanya mendistribusikan sumber daya secara efisien tetapi juga memastikan bahwa bantuan tersebut diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, PKH juga memberikan syarat-syarat tertentu, seperti memastikan anak-anak dari keluarga

penerima bantuan tetap bersekolah dan mendapatkan layanan kesehatan. Program ini menunjukkan bagaimana kebijakan pembangunan yang efisien dalam penggunaan anggaran dapat sekaligus mendukung tujuan keadilan sosial dengan memastikan bahwa bantuan tepat sasaran.

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah program lain yang dapat dijadikan contoh. Dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan, BPNT memberikan bantuan pangan kepada masyarakat miskin dalam bentuk kartu elektronik yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di pasar atau toko yang telah bekerja sama. Program ini bertujuan untuk mengurangi kerawanan pangan yang sering kali menjadi masalah di kalangan keluarga miskin. Melalui BPNT, pemerintah dapat menghemat biaya administrasi yang sering kali diperlukan dalam distribusi bantuan pangan tunai dan mengurangi potensi penyelewengan Iwan Hermawan et al., 2021. Namun, meskipun terkesan efisien, BPNT tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial dengan memastikan bahwa bantuan pangan diterima oleh mereka yang membutuhkan.

Selain itu, Dana Desa merupakan salah satu kebijakan yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan di desa dengan melibatkan anggaran yang langsung disalurkan ke tingkat desa. Konsep dasar dari Dana Desa adalah untuk meningkatkan infrastruktur desa dan kualitas hidup masyarakat desa dengan cara yang lebih efisien, sekaligus memperkuat

kemandirian ekonomi lokal. Anggaran yang dikelola di tingkat desa memungkinkan adanya kontrol yang lebih baik dan memastikan bahwa pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari masyarakat desa. Dana Desa telah berhasil mendukung pembangunan fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas air bersih, yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Di sisi lain, Dana Desa juga memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang merupakan salah satu prinsip utama keadilan sosial.

Namun, di balik keberhasilan kebijakan-kebijakan tersebut, terdapat tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan efisiensi anggaran tetap sejalan dengan tujuan keadilan sosial. Salah satu tantangan besar adalah masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun program seperti PKH dan BPNT sudah dirancang dengan baik untuk mencapai tujuan sosial, namun masih ada masalah dalam pengawasan yang memadai terhadap distribusi bantuan Prihatmanto et al., 2023

Korupsi dan penyalahgunaan anggaran di beberapa daerah dapat menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan

Selain itu, masalah ketimpangan antar wilayah di Indonesia juga menjadi hambatan

besar. Meskipun kebijakan seperti Dana Desa memungkinkan pemerataan pembangunan, kenyataannya masih ada ketimpangan yang signifikan antara desa yang satu dengan yang lainnya, baik dari segi infrastruktur maupun kualitas layanan publik. Desa-desa yang lebih maju sering kali mendapatkan akses yang lebih baik terhadap program pemerintah, sementara desa-desa terpencil atau daerah dengan aksesibilitas yang terbatas sering kali ketinggalan.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu ada peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap program-program pembangunan. Pemerintah pusat harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk program-program ini benar-benar sampai ke tangan mereka yang membutuhkan (Kaharuddin, K., & Rusli, R. (2021, October). Penggunaan teknologi dan sistem informasi yang lebih baik, seperti aplikasi berbasis data untuk memantau distribusi bantuan, dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Pada akhirnya, meskipun program-program tersebut menunjukkan hasil yang positif, implementasi yang berkelanjutan dan pemerataan manfaat dari kebijakan-kebijakan pembangunan tersebut memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak. Kebijakan yang efisien dalam penggunaan anggaran dapat mendukung keadilan sosial, namun hanya jika disertai dengan pengawasan yang ketat dan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahap perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan aktif masyarakat akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal dan dapat mengurangi ketimpangan yang ada. Dengan demikian, efisiensi anggaran dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip keadilan sosial dalam pembangunan Indonesia.

Pengaruh Efisiensi Anggaran terhadap Pencapaian Keadilan Sosial

Efisiensi anggaran dalam kebijakan pembangunan sering kali dipandang sebagai upaya untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya terbatas. Namun, penerapan efisiensi anggaran harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan sosial. Di Indonesia, keberhasilan efisiensi anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan tercapainya keadilan sosial, karena sering kali kebijakan yang lebih berfokus pada penghematan anggaran justru mengabaikan kebutuhan dasar yang mendesak di masyarakat (Kurniawan, T. L. (2025).

Salah satu contoh terkait efisiensi anggaran adalah penerapan kebijakan subsidi yang berkurang pada sektor-sektor penting seperti energi dan pangan. Sebelumnya, Indonesia memberikan subsidi besar pada bahan bakar minyak (BBM) dan energi lainnya untuk menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat miskin. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mengurangi atau mengalihkan subsidi tersebut dengan alasan efisiensi anggaran,

mengingat tekanan fiskal yang ada. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban anggaran negara yang semakin meningkat. Namun, meskipun anggaran negara menjadi lebih efisien, dampaknya justru lebih dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu, karena mereka menjadi lebih sulit mengakses kebutuhan dasar.

Sektor pendidikan juga menghadapi tantangan serupa. Pemerintah Indonesia, dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi anggaran, telah memangkas beberapa anggaran untuk program-program pendidikan. Walaupun ini berkontribusi pada penghematan anggaran, namun hasilnya bisa dilihat pada berkurangnya kualitas pendidikan di daerah-daerah yang lebih terpencil. Pemerintah pusat seringkali kesulitan memastikan bahwa pemotongan anggaran tersebut tidak mempengaruhi penyediaan pendidikan yang layak bagi anak-anak di daerah tersebut. Oleh karena itu, meskipun terjadi efisiensi, distribusi manfaat pendidikan tidak merata, yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan sosial Wirandana, P. A., & Khoirunurrofik, K. (2024).

Di sisi lain, terdapat upaya untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan sosial dalam program-program pembangunan. Sebagai contoh, beberapa program pemerintah yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah terisolasi, seperti jalan dan jembatan, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Namun, kebijakan ini seringkali terkendala oleh terbatasnya

anggaran, sehingga pilihan-pilihan pembangunan yang lebih efisien dari segi biaya sering kali lebih diprioritaskan daripada yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut.

Selain itu, dalam sektor kesehatan, meskipun anggaran untuk program-program kesehatan terus meningkat, efisiensi dalam pengelolaannya sering kali kurang memperhatikan keadilan sosial. Program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diinisiasi oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, efektivitas implementasi JKN terkendala oleh kurangnya anggaran untuk memperluas akses layanan di daerah-daerah terpencil. Secara keseluruhan, meskipun efisiensi anggaran dalam kebijakan pembangunan di Indonesia penting untuk menanggulangi defisit anggaran negara, penerapan kebijakan ini harus lebih sensitif terhadap kondisi sosial yang ada Putri, D. A. M. D. (2025). Efisiensi yang hanya berfokus pada penghematan anggaran sering kali mengabaikan kelompok masyarakat yang paling rentan, yang justru membutuhkan lebih banyak perhatian dan alokasi anggaran. Dengan demikian, agar pembangunan dapat berlanjut secara adil, dibutuhkan kebijakan yang menggabungkan efisiensi anggaran dengan distribusi yang lebih merata dan memperhatikan keadilan sosial.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan pembangunan dan efisiensi anggaran untuk mencapai keadilan sosial. Keadilan sosial dalam konteks pembangunan berarti pemerataan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam kondisi sosial-ekonomi kurang beruntung. Meski pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan keadilan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Dana Desa, tantangan masih ada dalam pengelolaan anggaran, distribusi yang tidak merata antarwilayah, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Efisiensi anggaran menjadi aspek penting dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, tetapi penghematan anggaran yang tidak memperhatikan keadilan sosial justru dapat memperburuk ketimpangan. Seperti yang terlihat dalam pemotongan subsidi energi dan pendidikan, kebijakan tersebut meskipun mengurangi beban fiskal negara, sering kali merugikan kelompok masyarakat miskin yang sangat bergantung pada layanan dasar tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus berfokus pada keseimbangan antara efisiensi anggaran dan distribusi manfaat yang adil bagi semua lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, pencapaian keadilan sosial dalam pembangunan Indonesia memerlukan upaya berkelanjutan untuk

mengurangi ketimpangan antarwilayah, memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan. Efisiensi anggaran yang sensitif terhadap kebutuhan sosial akan memungkinkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, G. N. K. (2024). Pengaruh Program Pengentasan Kemiskinan Di 25 Provinsi Wilayah Prioritas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. *Media Ekonomi*, 32(1), 61-76.
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural. *Foundasia*, 13(1), 1-15.
- Aqiilah, I. N., & Najicha, F. U. (2023). Peran Keadilan Sosial Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial: Evaluasi Terhadap Realisasi Sila Kelima Pancasila. *Researchgate, Surakarta: Desember*.
- Arifin, P., Muhafidin, D., & Pancasilawan, R. (2024). *City growth and its impact on residential problems: A case study in the city of Jakarta. Journal of Community Service and Empowerment*, 5(2), 272-281
- Baihaqi, I. (2024). Zakat sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 171-182.
- Bird, RM, & Zolt, EM (2005). Peran terbatas pajak penghasilan pribadi di negara-negara berkembang. *Jurnal Ekonomi Asia*, 16 (6), 928-946.
- Christensen, T., Lægreid, P., & Rykkja, L. H. (2024). Governance Reforms in Scandinavia: Denmark, Norway, and Sweden. In *Comparative Governance*

- Reforms: Assessing the Past and Exploring the Future* (pp. 57-74). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Da Silva, M. (2012). Amartya Sen, the idea of justice (Harvard university press, 2009); ISBN: 9780674060470; 496 pp; \$22.95; paperback. *German Law Journal*, 13(1), 54-66.
- Glewwe, P., & Kassouf, A. L. (2008). The impact of the Bolsa Escola/Família conditional cash transfer program on enrollment, grade promotion and drop out rates in Brazil. *Anais do XXXVIII Encontro Nacional de Economia*.
- Gupta, J., & Vegelin, C. (2023). Inclusive development, leaving no one behind, justice and the sustainable development goals. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 23(2), 115-121.
- Hadi, S., Taufiki, A., Ahmad, M. Z., & Siswanto, A. (2024). Analisis Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 Di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember. *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, 2(1), 32-39.
- Hadiansyah, Y. (2025). EFISIENSI ANGGARAN DALAM EVALUASI PEMBANGUNAN: ANALISIS FUNGSI ORGANISASI BPKAD NTB, OPINI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL X, DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 8(1), 109-124.
- Handayani, S., Suharno, S., & Badriah, LS (2022). Efektivitas Belanja Pemerintah Daerah terhadap Pengurangan Angka Kemiskinan di Jawa Tengah, Indonesia. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 17 (1).
- Hatim, F., & Hijrasil, H. (2024). The Effect of PAD, DAU, DAK, BHSDA, Investment, and Economic Growth on Poverty in North Maluku Province. *International Journal of Social Science and Business*, 8(2), 317-327.
- Irawan, R., & Pasaribu, E. (2024). The Effect Of Health Expenditure On Life Expectancy In Bengkulu. *Jurnal Ekonomi*, 29(3), 552-569.
- Iwan Hermawan, S. P., Izzaty Izzaty ST, M. E., Eka Budiyaniti, S. S., Rafika Sari, S. E., Yuni Sudarwati, S., & Mohammad Teja, S. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 131-145.
- Kaharuddin, K., & Rusli, R. (2021, October). Evaluasi program dana desa. In *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 23, No. 4, pp. 623-631).
- Kurniawan, T. L. (2025). Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Yang Berkeadilan. *Unizar Law Review*, 8(1), 134-141.
- Listyono, G. M., Oinike, A., & Hambali, D. (2025). Uncovering the spatial link between environmental risks, diarrhea incidence, and health service accessibility. *Environmental and Materials*, 3(1).
- Lundberg, O. (2007). Social Inequalities in Health. New Evidence and Policy Implications. J Siegrist and M Marmot (eds).
- Mualifu, M., Guspul, A., & Hermawan, H. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1), 49-59.
- Mursalin, D., & Irawan, T. (2025). Menyeimbangkan Pertumbuhan

- Daerah, Pemerataan, dan Spasial: Dilema Desentralisasi dalam Pembangunan Indonesia. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN*, 14 (1), 58-82.
- Nurhayana, E., & Soebagiyo, D. (2023). Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008-2022. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 4(2), 106-119.
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach*. Harvard University Press.
- Prihatmanto, H. N., Munajat, M. D. E., & Irawati, I. (2023). Detecting the corruption pattern and measuring the corruption detection pace at the Indonesian village level. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 9(2), 289-308
- Putri, D. A. M. D. (2025). Controversial Policy Seeking Balance Between Savings and Basic Needs. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 9-9.
- Rajagukguk, M. T., Panjaitan, M., & Rajagukguk, J. (2025). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DI DESA SEI BELUTU KECAMATAN SEI BAMBAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI). *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(3), 222-233.
- Riambodo, R. M., Suryawati, C., & Arso, S. P. (2020). Analisis perencanaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): studi kasus pada Puskesmas Halmahera dan Ngesrep di Kota Semarang. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 9(1), 44-50.
- Salman, S., & Iqbal, M. (2025). Analisis Efektivitas Kebijakan Efisiensi Anggaran: Ditinjau Dari Aspek Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 68-72.
- Sari, R. (2014). Dampak kebijakan desentralisasi fiskal pada daerah tertinggal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 79-99.
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Harvard University Press.
- Silver, C. (2024). Urbanisasi pesat: tantangan dan peluang perencanaan di kota-kota Indonesia. *Perekonomian Indonesia dan wilayah sekitarnya di abad ke-21: esai untuk menghormati Iwan Jaya Azis*, 35-48.
- Škuflić, L., Vučković, V. and Walter, D., 2024. The cost of fiscal austerity: A synthetic control approach. *Ekonomski vjesnik: Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues*, 37(2), pp.339-353.
- Sovacool, BK (2017). Meninjau, mereformasi, dan memikirkan kembali subsidi energi global: menuju agenda penelitian ekonomi politik. *Ecological Economics*, 135, 150-163.
- Steinbacher, C. (2024). The pursuit of welfare efficiency: when institutional structures turn 'less' into 'more'. *Policy Sciences*, 57(2), 353-378.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. W.W. Norton & Company.
- Supriyantony, E. (2024). Analisis Efisiensi Pembangunan Infrastruktur PU di Indonesia: Pendekatan ICOR. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 19-30.
- Suryanto, T., Utami, P., & Ahmad, R. (2024). Aligning Sharia-Based Empowerment with SDGs: Addressing Poverty and Inequality in Coastal Regions. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 15(1), 53-71.%%

- Tadjoeddin, M. Z. (2016). Earnings, productivity and inequality in Indonesia. *The Economic and Labour Relations Review*, 27(2), 248-271.
- Tirole, J. (2017). *Economics for the Common Good*. Princeton University Press.
- Tirtosuharto, D. (2022). The impact of fiscal efficiency on poverty reduction in Indonesia: Institutional factor and geographical differences. *Journal of Geographical Systems*, 24(1), 67-93.
- Waheduzzaman, W. (2019). Challenges in transitioning from new public management to new public governance in a developing country context. *International Journal of Public Sector Management*, 32(7), 689-705.
- Yetmi, U. S. (2021). Penilaian Terhadap efisiensi pengeluaran publik: Tinjauan Literature. *EKONOMI BISNIS*, 27(2), 739-753.

PROFIL SINGKAT

Penulis pertama atas nama Lukman Rais, S.Sos., M.Si merupakan Dosen pada Program Studi Sosiologi Universitas Muhamamadiyah Sorong.